

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai permasalahan bagi semua negara berkembang, kemiskinan menjadi perhatian utama dalam tujuan pembangunan di negara berkembang. Kemiskinan di Indonesia berdasarkan pada jumlah rupiah yang dikonsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah) dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori itu berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologi penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin (Badan Pusat Statistik, 2010)

Kemiskinan merupakan masalah yang memiliki dampak yang banyak terhadap berbagai aspek karena menyangkut soal pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidak samaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Berawal dari kemiskinan maka akan banyak bermunculan masalah-masalah lainnya seperti banyaknya gembel dan pengemis di jalan dan di sudut perkotaan, begitu juga PSK dan anak-anak jalanan yang terkena razia, bisa dipastikan semua itu beralasan karena faktor ekonomi. Belum lagi anak putus sekolah yang selalu meningkat

jumlahnya dari tahun ketahun yang menyebabkan tidak berkualitasnya tenaga kerja Indonesia. Lansia terlantar, anak-anak terlantar, penyandang difabel terlantar, suatu masalah soasial yang berpangkal dari kemiskinan.

Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaka melakukan berbagai kebijakan dan program-program untuk menekan angka kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan atau tidak tepat sasaran. Ketimpangan dalam menanggulangi kemiskinan di pusat dan daerah masih terjadi karena kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran karena rendahnya sumberdaya manusia yang berkualitas. Pada tahun 2011 sampai 2014 presentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dapat kita lihat pada tabel di bawah adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan presentase kemiskinan di Indonesia.

Tabel I-1
Presentase Penduduk Miskin (persen), 2011-2014

Negara	Presentase Penduduk Miskin di Indonesia (Persen)			
	2011	2012	2013	2014
Indonesia	09.87	8,69	8,45	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,62% yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan, namun di beberapa Provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat presentase kemiskinan yang naik seperti di provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara. Sementara pada Provinsi lainnya di Indonesia mengalami naik turunnya presentase kemiskinan yang cukup lambat salah satunya seperti provinsi Bengkulu yang mengalami penurunan jumlah kemiskinan sebesar 0,04% selama 4 tahun.

Permasalahan kemiskinan bisa ditimbulkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Bahwa tersedianya SDM yang berkualitas ini merupakan syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan (Sjafi'i dan Hidayanti, 2009 : 68-69). Maka dari itu pemerintah Provinsi Banten juga punya pekerjaan besar untuk meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia). Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia. Langkah itu dinilai efektif karena mampu memutuskan mata rantai kesenjangan di masyarakat,

yang mana akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan “kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah? Kenapa rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena pendidikannya rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan. Kenapa pendidikannya rendah? Karena miskin. Berputar seperti lingkaran setan,”

Pada kurun tahun 2011 sampai 2014 Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan angka peningkatan yang cukup baik, dapat kita lihat pada tabel di bawah adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Tabel I-2

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru), 2011-2014

Negara	Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Persen)			
	2011	2012	2013	2014
Indonesia	67.09	67.70	68.31	68.90

Sumber: Badan Pusat statistic

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,81% yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dan stabil di semua Provinsi di Indonesia. Pemerataan antara Provinsi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang cukup serius bagi pemerintah, ketimpangan presentase antara Provinsi DKI Jakarta dan Papua sebesar 21,33%. Pemerataan pembangunan yang menopang dalam meningkatkan SDM yang baik sangat mempengaruhi tingkat Indeks Pembangunan Manusia saat ini. Indikator yang berperan penting dalam menaikkan IPM ialah akses yang mudah untuk mendapatkan pendidikan dan Kesehatan.

Maka dari itu peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi ketimpangan agar IPM yang berkualitas dapat tersebar di segala wilayah Provinsi di Indonesia dengan menunjukkan keberpihakan pemerintah pada mereka yang lemah. Selain di sektor pendidikan pemerintah juga berperan dalam meningkatkan harapan hidup masyarakat. Menurut UNDP meskipun usia harapan hidup negara-negara didunia terus naik secara dramatis, namun tidak diikuti oleh kenaikan usia harapan hidup sehat secara signifikan.

Misalkan usia harapan seseorang telah mencapai 80 tahun, namun sejak umur 70 tahun dia menderita penyakit. Ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Defisit BPJS kesehatan yang terus membengkak apabila kebijakan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tidak segera dilaksanakan. Jika ketimpangan dalam membangun manusia di Indonesia dapat teratasi dengan baik dan angka harapan hidup bisa dinaikan beserta usia harapan hidup yang sehat, dengan cara itu akan meningkatkan angka IPM yang berkualitas dan merata diseluruh wilayah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan (Levinia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, & Richard L.H Tumilaar, 2015) indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai nilai koefisien sebesar $-1,433856$ yang berarti bahwa indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,01433% ceteris paribus. Pengaruh tersebut sesuai dengan teori dan signifikan secara statistik. Secara teori apabila indeks pembangunan manusia meningkat kemiskinan akan menurun. Hasil yang sama juga diperoleh dari

penelitian (Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, 2010) berdasarkan hasil perhitungan maka dengan membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap besarnya kemiskinan adalah IPM.

Selain peningkatan pertumbuhan Pembangunan Manusia yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin tinggi. besarnya tingkat pengangguran yang tinggi merupakan ukuran kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja iningin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Selain itu pengangguran juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga (Sadono Sukirno, 2004:14)

Pada kurun waktu tahun 2011 sampai 2014 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2012, dapat kita lihat pada tabel di bawah adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten

Tabel I-3***Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2011-2014***

Negara	Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia (persen)			
	2011	2012	2013	2014
Indonesia	7,22	6,25	6,02	5,82

Sumber: Badan Pusat statistic

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2011 sampai 2014 menunjukkan penurunan sebesar 1,4% yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2012 turun sebesar 0,97%. Pemerataan lagi-lagi menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia, ketimpangan presentase Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 di beberapa Provinsi masih cukup tinggi yang angkanya masih di atas 9% yaitu provinsi Aceh, Banten dan Maluku. Pemerataan kesempatan kerja berbagai sektor di seluruh wilayah Provinsi di Provinsi adalah tantangan yang sebenarnya yang harus di selesaikan pemerintah Indonesia.

Pengangguran yang cukup tinggi terjadi di Indonesia dapat menyebabkan presentase penduduk miskin akan semakin meningkat karena masyarakat akan kesulitan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian yang dilakukan Dio Syahrullah (2014) berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa TPT berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dengan tingkat keyakinan 95% dan nilai probabilitas sebesar 0,0006%. Hasil yang sama juga di peroleh dari penelitian Sylvia Yasmin Supraba (2018) berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita lihat masih tingginya ketimpangan yang terjadi pada masalah perbedaan angka baik itu kemiskinan, IPM maupun TPT yang masih cukup tinggi antara kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Hal ini memiliki ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Presentase kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini pula yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisi Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Kemiskinan di Indonesia*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Seberapa besar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kemiskinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan koleksi pustaka di Universitas Negeri Jakarta, serta mampu memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan serta referensi bagi peneliti lain mengenai pengaruh indeks kebahagiaan dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan indeks kebahagiaan dan indeks pembangunan manusia (IPM) karena dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.